Nama : Adrian Daulat Limbong

NPM : 2012011276

Mata Kuliah : Bahasa Indonesia

Dosen : Atik Kartika, S.Pd., M.Pd.

Isu Pelanggaran HAM di Papua

pernyataan Perdana Menteri Republik Vanuatu Bob Loughman yang mengungkit isu pelanggaran HAM di Papua dalam Sidang Majelis Umum PBB, yang digelar pada Sabtu (26/september/2020) lalu, dengan tujuan yang tidak lain dan tidak bukan yaitu ingin memerdekakan papua barat.

Jika kita melihat kebelakang sebenarnya vanuatu telah lama menyuarakan kemerdekaan terhadap papua barat, Semenjak kemerdekaan Vanuatu pada tahun 1980, pemerintah vanuatu menyatakan bahwa kemerdekaan Vanuatu belumlah sempurna hingga seluruh bangsa dan wilayah Melanesia terbebas dari kolonialisme. Inilah asal-muasal dan alasan Vanuatu mendukung kemerdekaan Papua Barat. Istilah Melanesia itu sendiri merupakan rujukan untuk menamakan sebuah kelompok etnis dan penggolongan pulau-pulau di Pasifik Selatan pada masa kolonial. Namun kini klasifikasi dengan sudut pandang rasial itu dianggap tidak tepat sehingga Melanesia hanya dipakai dalam konteks geografis saja.
 pada intinya Republik Vanuatu ini merupakan negara yang masih konsisten sampai saat ini mendukung OPM untuk memisahkan diri dari Indonesia. tujuan Vanuatu untuk menjadi pemimpin ras Melanesia terus dilakukan dalam bentuk apapun, termasuk mendukung gerakan separatisme, seperti OPM. Kebijakan yang diberikan oleh Republik Vanuatu tidak hanya sebatas dukungan suara, melainkan dukungan fisik dan moril terhadap kemerdekaan Papua Barat. Beberapa bentuk kebijakan yang diberikan Republik Vanuatu yakni menyediakan kantor perwakilan rakyat Papua Barat di Republik Vanuatu, kemudian vanuatu juga mendorong dibukanya kasus-kasus ketidakadilan yang selama ini terjadi di Papua, dan memperjuangkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Papua.

pada tanggal4 Maret 2014,Perdana Menteri Vanuatu Moana Carcasses Katokai Kalosil di hadapan Sidang Tingkat Tinggi HAM PBB ke-25, mendesak komunitas internasional mendukung kemerdekaan rakyat Papua. Penduduk Negara-negara Pasifik yang sama-sama bangsa Melanesia, meyakini bahwa rakyat Papua selama hampir 50 tahun ditindas oleh Indonesia. serta Adanya ketidakseimbangan antara wilayah barat dengan wilayah timur,. Kebijakan Republik Vanuatu dalam mendukung Kemerdekaan Papua Barat sangat terlihat dari sikap yang diberikan Vanuatu kepada Indonesia. Hal ini terlihat sepanjang tahun 2016, dimana Vanuatu memberikan sikap yang tidak bersahabat kepada Indonesia. Dimana salah satu sikap yang dilakukan oleh Vanuatu yakni menolak secara sepihak kunjungan yang dilakukan oleh Indonesia ke Vanuatu. Bahkan sepanjang tahun 2016, Vanuatu konsisten mendukung kemerdekaan Papua Barat.

Dilihat dari aspek politik, Republik Vanuatu menjadikan Ras Melanesia dan kawasan Pasifik Selatan menjadi prioritas utamanya. Hal ini terlihat dari sejarah politik Vanuatu yang pada waktu itu dipimpin oleh Walter Lini, Bapak Proklamasi Vanuatu ini mempromosikan konsep “Melanessia Socialism”. Konsep ini pada dasarnya adalah Walter lini percaya bahwa ideologi sosialisme adalah ideologi yang paling cocok untuk ras Melanesia, karena mendukung kepemilikan bersama daripada kepemilikan individual. Tetapi Walter Lini berpendapat bahwa Melanesia Socialism ini tidak harus berkiblat pada Rusia ataupun China, tetapi lebih condong kepada mendorong bersatunya negara-negara ras Melanesia.

 Dalam politik luar negerinya, Vanuatu menjadikan isu Papua sebagai komoditas politik guna meraih simpati dari Negara-negara kawasan, bahwasanya Vanuatu selalu konsisten mendukung dan memperjuangkan kebebasan masyarakat Melanesia yang terjajah. Salah satu bentuk perjuangan yang dilakukan Vanuatu salah satunya yakni mengangkat isu Papua di pertemuan Dewan HAM ke-32 di Janewa pada bulan Juni 2016. Dan isu-isu tersebut selalu di gunakan vanuatu guna memperjuangkan usahanya sampai saat ini.

Mengenai peran, Indonesia sebenarnya sudah cukup lama menyadari kecenderungan Vanuatu untuk mendukung kemerdekaan Papua. Namun, baru beberapa tahun terakhir Indonesia menanggapinya secara serius. seiring semakin vokalnya Vanuatu di berbagai forum internasional, Indonesia lantas mulai melakukan pendekatan dengan Vanuatu, salah satunya melalui diplomasi publik dengan memanfaatkan instrumen kerja-sama ekonomi, teknologi, pelatihan, beasiswa, pembangunan, pertanian, peternakan dan lain-lain. Indonesia juga memberikan bantuan luar negeri senilai 2 juta USD ketika Vanuatu terkena dampak yang cukup parah dari Badai Pam Pam yang menerpa negara-negara di kawasan Pasifik. Kendati demikian, upaya diplomasi publik Indonesia terhadap Vanuatu tampaknya belum berhasil mengondisikan negara tersebut untuk mendukung penuh kedaulatan Indonesia atas Papua. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa Vanuatu masih memberikan dukungannya terhadap gerakan separatis Papua.

 Alih-alih Diplomasi Publik yang dilakukan Indonesia terhadap Vanuatu dalam Upaya Membendung Gerakan Separatisme Papua, Vanuatu beserta sejumlah negara di Pasifik Selatan lainnya secara terang-terangan menyatakan dukungannya atas pemerdekaan Papua, dengan meminta PBB melakukan investigasi serta menyerukan agar Papua Barat diberikan hak penentuan nasib sendiri dalam Sidang Tahunan Majelis Umum PBB ke-71 di New York, Amerika Serikat.

Dapat disimpulkan bahwa Indonesia sedang menghadapi internasionalisasi masalah Papua, maka dari itu Pemerintah Indonesia harus melakukan antisipasi secara nasional dan memperkuat diplomasi politik, baik secara bilateral maupun multilateral, yakni melalui forum regional dan internasional. Dalam menjalankan kebijakan diplomasi, diplomasi yang harus dimainkan adalah diplomasi total dengan melibatkan semua kekuatan komponen bangsa. masalah Papua memang menjadi tanggung jawab Kementerian Luar Negeri, tetapi juga harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh kekuatan bangsa Indonesia. Dan melalui dalam negeri harus ada upaya pula, seperti pengoptimalan pembangunan pada wilayah papua. Dengan terealisasikannya hal tersebut diharapkan menarik dunia internasional khususnya vanuatu untuk merubah persepsi bahwa kedaulatan indonesia secara penuh dan utuh, dari sabang hingga merauke.